

## **ABSTRAK**

### **Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

**Notrisia Maria Mautuka**

**20310071**

Judul penulis adalah : **Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa Hakim pada pengadilan tata usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mengabulkan gugatan pengugat dalam sengketa pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Mengapa Hakim Mahkamah Agung menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam sengketa Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan penelitian yang ingin penulis kaji yaitu : Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mengabulkan gugatan pengugat dalam sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima dalam Sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dan Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan pengugat dan alasan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam penyelesaian sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian maka alasan Hakim Pengadilan Tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara mengabulkan gugatan pengugat dalam sengketa surat keputusan menteri dalam negeri tentang pengangkatan dan pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah karena pengugat dianggap memiliki kepentingan hukum, gugatan yang diajukan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang, penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas proposional, sedangkan yang menjadi alasan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa surat keputusan menteri dalam negeri tentang pengangkatan dan pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah objek sengketa secara substantif telah bersesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D./XI/2013. Adapun saran penulis adalah Kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini mendasari dalam pengeluaran Surat Keputusan Mentri dalam Negeri harus lebih baik dan cermat agar setiap Keputusan yang dikeluarkan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan Pemilu telah Banyak Mengalami Kemajuan Yang Berarti. Namun Kedepan Harus Ada Suatu Pembinaan Dan Penyempurnaan Aturan-Aturan Hukum Pelaksanaan Pemilu Yang Dimulai Dengan Amendemen Konstitusi Sebagai Hukum Dasar Dengan Memperjelas Arti Pemilihan Demokratis

**Kata kunci : Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Daerah**

## **ABSTRACT**

### **Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

**Notrisia Maria Mautuka**

**20310071**

The author's title is: Legal Analysis of the Dispute of the Decree of the Minister of Home Affairs Concerning the Approval and Appointment of Regional Heads and Deputy Regional Heads The formulation of the problem in this study is: Why did the Judges at the State Administrative Court and the High State Administrative Court grant the plaintiff's lawsuit in the dispute over the approval and appointment of Regional Heads and Deputy Regional Heads And why did the Supreme Court Judges declare the Plaintiff's lawsuit inadmissible in the dispute over the Approval and Appointment of Regional Heads and Deputy Regional Heads. The purpose of the research that the author wants to study is: To find out the reasons why the Judges at the State Administrative Court and the High State Administrative Court granted the plaintiff's lawsuit in the dispute over the Decree of the Minister of Home Affairs Concerning the Appointment and Approval of Regional Heads and Deputy Regional Heads and To find out the reasons why the Supreme Court Judges declared the plaintiff's lawsuit inadmissible in the Dispute over the Decree of the Minister of Home Affairs Concerning the Appointment and Approval of Regional Heads and Deputy Regional Heads. The nature of this research is descriptive and the type of research used is normative research. The independent variables in this research are the reasons the Jakarta State Administrative Court and the Jakarta State Administrative High Court granted the plaintiff's lawsuit and the reasons the Supreme Court declared the lawsuit unacceptable in the dispute over the Decree of the Minister of Home Affairs concerning the Appointment and Validation of Regional Heads and Deputy Regional Heads. Meanwhile, the dependent variable in this research is the judge's decision in resolving disputes in the Decree of the Minister of Home Affairs concerning the Ratification and Appointment of Regional Heads and Deputy Regional Heads.

Based on the research results, the reason why the State Administrative Court Judge and the High State Administrative Court granted the plaintiff's lawsuit in the dispute over the Minister of Home Affairs' Decree on the appointment and ratification of regional heads and deputy regional heads was because the plaintiff was considered to have a legal interest, the lawsuit was filed according to the deadline set by law, the issuance of the disputed object was contrary to the general principles of good governance, especially the principle of accuracy and the principle of proportionality, while the reason the Supreme Court declared the lawsuit inadmissible in the dispute over the Minister of Home Affairs' Decree on the appointment and ratification of regional heads and deputy regional heads was that the object of the dispute was substantively in accordance with the Constitutional Court's decision Number 37/PHPU.D./XI/2013. The author's suggestion is that the authorized official in this case, the basis for issuing the Minister of Home Affairs Decree must be better and more careful so that every decision issued can be accepted by the relevant party. The Implementation of the Regional Election Has Experienced Significant Progress. However, in the future there must be improvements and refinement of the legal regulations for the implementation of regional elections, starting with an amendment to the Constitution as the basic law by clarifying the meaning of democratic elections.

**Keywords: Appointment and Confirmation of Regional Heads**